

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dini Andriyani<sup>1</sup>, Sri Wahyu Handayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, [dini\\_a@staff.gunadarma.ac.id](mailto:dini_a@staff.gunadarma.ac.id), Universitas Gunadarma

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, [yani@staff.gunadarma.ac.id](mailto:yani@staff.gunadarma.ac.id), Universitas Gunadarma

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota di Jawa Timur periode 2014-2018 dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas/keserasian daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kota di Jawa Timur yang berjumlah 9 Kota termasuk Provinsi Jawa Timur. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diambil dari <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah tergolong sangat rendah dan pola hubungannya instruktif, tingkat efektivitas keuangan daerah Kota di Jawa Tengah tergolong sangat efektif, rasio keserasian yang menjelaskan bahwa hasil belanja rutin lebih diprioritaskan dibandingkan belanja modal, kemampuan keuangan daerah tergolong kedalam kondisi yang belum ideal. **Kata kunci :** Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

### ABSTRACT

The purpose of this research is to understand and analyse City government finances in East Java in the 2014-2018 period seen from the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional needs, the ratio of regional financial independence, growth ratio, regional effectiveness ratio. The population in this study were all cities in East Java which won 9 cities including East Java Province. The sampling method using secondary data collection methods taken from <http://www.djpk.depkeu.go.id>. The sampling technique used in this study is purposive sampling. The results of this study indicate that the level of independence of the region is classified as very low and the pattern of instructive support, the financial level of the City in Central Java is classified as very effective, the harmony ratio which explains that the results of routine expenditure are more easily prioritized than capital expenditure, the financial capacity of the region is ideal.

**Keywords:** Financial performance, Ratio of Regional Financial Independence, Effectiveness Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampumendukung operasionalisasi daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara baik, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim,2007). Ditetapkan juga Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel maka dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah tersebut adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Nurhayati, 2015).

Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas/keserasian daerah untuk menghitung kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, peneliti tertarik meneliti apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dengan membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan rentang periode 2014 –2018.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2018, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten/Kota, 2.827 Perkotaan dan 5.674 Pedesaan. Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 5,50% lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 5,45%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,55%. bila dibandingkan Tahun 2015 tumbuh sebesar 5,44 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2014 tumbuh 5,86 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 6,08 persen. Data yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2014 hingga 2018. (jatim.bps.go.id).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014-2018.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk mengetahui, menghitung, dan menganalisis rasio keuangan. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis memahami serta mendalami materi yang berhubungan dengan pengukuran kinerja daerah seperti jurnal dan penelitian terdahulu.

**Rasio Kinerja Keuangan**

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Transfer Provinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian**

Skala Interval Rasio Kemandirian	Kemampuan Kemandirian Daerah	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2014

2. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Kriteria Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Skala Interval Rasio Efektifitas PAD	Kemampuan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Abdul Halim, 2014

3. Rasio Aktifitas

Menggambarkan keserasian bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

- ✓ Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

✓ Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Kriteria Rasio Aktivitas**

Skala Interval Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal	Kemampuan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
0%-50%	Tidak Baik
50%-100%	Baik

Sumber: Abdul Halim, 2014

4. Rasio pertumbuhan pendapatan

Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Dwijayanti dan Ruserlistyanti, 2013 dalam Dian Istyaningtias, 2017).

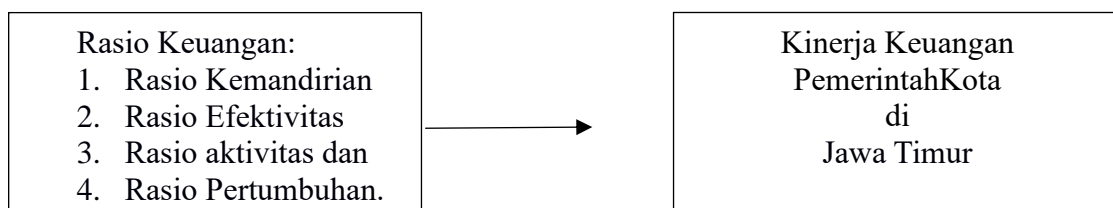
$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{PAD Th t} - \text{PAD Th t-1}}{\text{PAD th t-1}} \times 100\%$$

**Tabel 4. Kriteria Rasio Pertumbuhan Pendapatan**

Skala Interval Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Kemampuan Pertumbuhan Pendapatan
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50%-100%	Tinggi

Sumber: Dian Istyaningtias, 2017

**Kerangka Analisis**



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**PEMBAHASAN**

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur**

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2011-2014. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota di Jawa Timur. Dari data tersebut akan dapat diketahui Kinerja Keuangan Kota di Jawa Timur. Adapun hasil dari analisis Rasio tersebut adalah:

**a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur Periode Tahun 2014-2018 ditunjukkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Rasio Kemandirian Kota di Jawa Timur Periode 2014-2018**

<b>Kota</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kota Blitar	21,90%	25,09%	21,19%	34,62%	26,02%
	Instruktif	Konsultatif	Instruktif	Konsultatif	Konsultatif
Kota Kediri	26,65%	28,67%	28,29%	34,92%	28,30%
	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif
Kota Madiun	22,24%	27,57%	24,14%	36,09%	34,03%
	Instruktif	Konsultatif	Instruktif	Konsultatif	Konsultatif
Kota Malang	38,94%	45,87%	44,66%	50,08%	47,14%
	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Partisipatif	Konsultatif
Kota Mojokerto	23,99%	28,26%	27,42%	34,33%	33,00%
	Instruktif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif
Kota Pasuruan	21,30%	23,72%	25,67%	27,39%	23,54%
	Instruktif	Instruktif	Konsultatif	Konsultatif	Instruktif
Kota Probolinggo	25,35%	25,66%	27,93%	32,65%	26,36%
	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif
Kota Surabaya	222,21%	291,43%	210,72%	262,60%	238,07%

Kota	2014	2015	2016	2017	2018
	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif
Kota Batu	16,03%	20,69%	17,53%	25,34%	25,04%
	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Konsultatif	Konsultatif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio kemandirian semua kota di Provinsi Jawa Timur selama 2014-2018 yang memiliki rasio kemandirian tertinggi ada pada Kota Surabaya yaitu lebih dari 200% yang berarti Kota Surabaya ini memiliki pola hubungan yang delegatif yaitu merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sedangkan rasio kemandirian terendah ada pada Kota Batu pada tahun 2014 yaitu sebesar 16,03% yang berate pada tahun ini Kota Batu memiliki pola hubungan instruktif.

#### b. Rasio Keefektivitasan Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kota Jawa Timur Periode Tahun 2014-2018 ditunjukkan pada Tabel 6

**Tabel 6. Rasio Keefektifitasan Kota di Jawa Timur Periode 2014-2018**

Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Blitar	136,58%	147,10%	121,96%	158,34%	116,40%
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Kediri	150,97%	172,47%	124,30%	144,86%	110,26%
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Madiun	156,97%	147,86%	130,81%	144,74%	117,30%
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Malang	110,80%	120,23%	125,72%	143,67%	114,51%
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Mojokerto	143,74%	139,22%	124,93%	109,18%	90,96%
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif
Kota Pasuruan	145,38%	123,73%	133,32%	114,16%	109,72%

Kota	2014	2015	2016	2017	2018
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Probolinggo	167,26%	131,13%	131,60%	133,74%	104,93%
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Surabaya	111,96%	114,64%	106,54%	122,53%	105,52%
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Kota Batu	134,48%	130,05%	92,25%	120,45%	113,29%
	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa rasio efektifitas pada semua kota di Provinsi Jawa Timur selama 2014-2018 selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, namun penurunan yang terjadi masih dapat digolongkan sangat efektif karena rasionya >100% walaupun ada beberapa kota yang mengalami penurunan yang dapat digolongkan cukup efektif. Penurunan yang digolongkan cukup efektif ini terjadi pada Kota Mojokerto pada tahun 2018 yaitu sebesar 90,96% dan Kota Batu pada tahun 2016 yaitu sebesar 92,25%.

**c. Rasio Aktivitas**

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya padabelanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio Aktivitas Belanja Pemerintah daerah Kota di Jawa Timur Periode Tahun 2014-2018 ditunjukkan pada Tabel 7 dan Tabel 8.

**Tabel 7. Rasio Aktivitas Belanja Operasi Kota di Jawa Timur Periode 2014-2018**

Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Blitar	80,81%	78,48%	76,21%	77,68%	80,25%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kota Kediri	84,28%	75,27%	74,23%	80,85%	89,23%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kota Madiun	71,19%	74,69%	70,93%	67,25%	75,01%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kota Malang	80,13%	81,24%	88,66%	81,23%	81,75%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kota Mojokerto	77,56%	80,76%	67,85%	83,61%	85,19%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Pasuruan	82,90%	78,51%	78,03%	73,15%	77,24%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kota Probolinggo	86,13%	89,62%	83,61%	75,02%	82,81%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kota Surabaya	75,39%	72,50%	74,98%	68,18%	70,21%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kota Batu	78,41%	65,52%	78,59%	81,59%	85,25%
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa Untuk seluruh kota di Provinsi Jawa Timur memiliki rasio aktifitas yang mengalami kenaikan dan penurunan. Seluruh kota di Pronisi Jawa Timur memiliki rasio aktifitas untuk belanja operasi yang tergolong baik karenan memiliki rasio 50%-100% dan kota yang memiliki rasio tertinggi untuk belanja operasi adalah Kota Probolinggo pada tahun 2015 yaitu sebesar 89,62%.

**Tabel 8. Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota di Jawa Timur Periode 2014-2018**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Blitar	19,17%	21,52%	23,71%	22,31%	19,73%
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Kota Kediri	15,67%	15,57%	25,72%	19,15%	10,76%
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Kota Madiun	23,61%	20,79%	23,89%	26,80%	24,99%
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Kota Malang	19,87%	18,72%	11,33%	18,77%	18,24%
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Kota Mojokerto	22,40%	19,24%	32,15%	16,39%	14,78%
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Kota Pasuruan	17,10%	21,49%	21,96%	26,85%	22,76%
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Kota Probolinggo	13,74%	10,15%	16,20%	24,98%	17,19%



Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Kota Surabaya	24,61%	27,50%	25,02%	31,82%	29,72%
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
Kota Batu	21,59%	34,39%	21,27%	18,30%	14,72%
	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa Untuk seluruh kota di Provinsi Jawa Timur memiliki rasio aktifitas yang mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan untuk rasio aktifitas belanja modal di seluruh kota di Provinsi Jawa Timur ini memiliki rasio 0%-50% yang berarti tergolong tidak baik. Dan untuk rasio aktifitas belanja modal di Kota Probolinggo pada tahun 2015 ini sebesar 10,15%.

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 8 di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota di Jawa Timur yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada acuan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota di Jawa Timur kecil atau belum terpenuhi.

#### d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) Abdul Halim (2007) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhandikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Rasio Pertumbuhan Pemerintah daerah Kota di Jawa Timur Periode Tahun 2014-2018 ditunjukkan pada Tabel 9.

**Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Kota di Jawa Timur Periode 2014-2018**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Blitar	41,05%	18,01%	8,79%	47,64%	-16,30%
	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
Kota Kediri	43,56%	6,94%	7,39%	22,97%	-15,00%
	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Madiun	40,18%	22,36%	5,19%	33,12%	0,10%
	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
Kota Malang	17,24%	14,06%	12,38%	23,19%	-5,34%
	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Mojokerto	40,47%	22,78%	17,95%	16,94%	2,36%
	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Pasuruan	52,24%	14,00%	28,84%	0,11%	3,41%
	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
Kota Probolinggo	72,37%	5,46%	20,27%	19,05%	-13,80%
	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Surabaya	18,47%	22,02%	1,35%	26,20%	-3,66%
	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
Kota Batu	35,18%	29,49%	5,08%	36,42%	8,80%
	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan penduduk semua kota di Provinsi Jawa Timur selama 2014-2018 selalu mengalami kenaikan dan penurunan, dan penurunan selalu terjadi pada tahun 2018. Penurunan rasio pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada Kota Blitar tahun 2018 yaitu sebesar -16,30% dan kenaikan rasio pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada Kota Probolinggo pada tahun 2014 yaitu sebesar 72,37%.

Rasio pertumbuhan yang rendah artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah belum dikelola secara maksimal.

## KESIMPULAN

### *Kesimpulan*

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah tergolong sangat rendah dan pola hubungannya instruktif, tingkat efektivitas keuangan daerah Kota di Jawa Tengah tergolong sangat efektif, rasio keserasian yang menjelaskan bahwa hasil belanja rutin lebih diprioritaskan dibandingkan belanja modal, kemampuan keuangan daerah tergolong kedalam kondisi yang belum ideal.

### *Penelitian Selanjutnya*

Dari penelitian terbatas yang telah diungkapkan, dapat diberikan saran bahwa penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel-variabel Kinerja keuangan pemerintahan yang lain seperti rasio desentralisasi, rasio varians pendapatan dan menggunakan data seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: SalembaEmpat
- \_\_\_\_\_.(2014). Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik. Edisi Empat. Jakarta: SalembaEmpat
- Annisa, D. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Hasanuddin  
jatim.bps.go.id
- Suranta, S, dkk. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (*StudiKomparasi Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan*). Jurnal Akuntansi. Vol (5). No. 2
- Utomo, danang prio. (2011). *Analisis Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2000-2009*. Jurnal Educati. Vol (6) No.2  
www.djpk.depkeu.go.id